

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum di Kota Tebing Tinggi masih menjadi permasalahan yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan fungsi ruang publik. Kondisi tersebut menuntut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tebing Tinggi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Informan penelitian terdiri atas Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasional, akademisi, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP telah dilaksanakan melalui patroli rutin, sosialisasi, pemberian teguran, dan pendekatan persuasif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena tujuan penertiban belum tercapai secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh masih adanya Pedagang Kaki Lima yang kembali berjualan pada lokasi yang telah ditertibkan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan telah dilakukan, namun tingkat kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku masih rendah. Pelaksanaan tugas juga dihadapkan pada kendala berupa belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan Pedagang Kaki Lima serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat agar penertiban Pedagang Kaki Lima dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Penertiban

ABSTRACT

The occupation of sidewalks and other public facilities by street vendors in Tebing Tinggi City has continued to affect public order and the proper use of public spaces. This condition requires the Civil Service Police Unit (Satpol PP), as the local government agency responsible for enforcing regional regulations and maintaining public order, to perform its duties and functions effectively. This study aimed to analyze the effectiveness of Satpol PP in controlling street vendors in Tebing Tinggi City and to identify the obstacles encountered in its implementation. A qualitative approach was employed using purposive sampling. The participants consisted of the Head of Satpol PP, the Head of the Regional Regulation Enforcement Division, the Head of the Public Order Section, the Head of the Operational Section, an academician, street vendors, and community members. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and were analyzed using the interactive included data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings revealed that Satpol PP had carried out its duties through routine patrols, public outreach, verbal warnings, and persuasive enforcement measures in accordance with applicable regulations. However, the implementation was not fully effective because the objectives of enforcement had not been sustainably achieved, as many street vendors returned to prohibited locations after enforcement activities. In addition, coordination and communication with relevant stakeholders had been implemented, yet the level of compliance among street vendors remained low. The implementation was also constrained by the absence of specific local regulations governing street vendor management and inadequate operational facilities and infrastructure. Therefore, strengthening regulatory support, improving operational resources, and enhancing coordination among the local government, Satpol PP, and the community are essential to achieving more effective and sustainable public order.

Keywords : Effectiveness, Civil Service Police Unit, Street Vendors, Public Order, Law Enforcement